



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : KEMANTREN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBARJILAN**
2. Jabatan : **MANTRI PAMONG PRAJA**
3. NHK : **83416**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **404.500.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 112.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 982 m2/200 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 190 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 142.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **97.750.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO TECNO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. LAINNYA, FIRMAN MESIN GENERATOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA TYPE G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA NEW BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. LAINNYA, POLYGON POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
6. LAINNYA, POLYGON POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
7. LAINNYA, POLYGON POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **26.250.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **95.082.060**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**



Sub Total	Rp.	623.582.060
III. HUTANG	Rp.	61.060.732
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	562.521.328

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.